SEKRETARIAT DPRD
KOTA BONTANG

LKjIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020. LKIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) yang merupakan salah satu wujud pertangungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam waktu yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tidak lepas dari kedudukan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga Pewakilan Rakyat Daerah, sehingga keberhasilan dan atau kegagalan program dan kegiatan ini tidak lepas dari kinerja anggota DPRD itu sendiri.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari harapan kita, untuk itu tanggapan, saran maupun kriktik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna memperbaiki dan penyempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bontang, 31 Desember 2020

Sekretaris DPRD Kota Bontang

H. Lukman. S.S.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip: 19711231000031012

IKHTISAR EKSEKUSIF

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bontang memiliki 1 (Satu) tujuan, 3 (Tiga) sasaran, 4 (Empat) indikator sasaran, dan 7 (Tujuh) program untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Selanjutnya pada sasaran dan indikator sasaran/kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Sekretariat DPRD Kota Bontang dan Wali Kota Bontang. Dalam pelaksanaannya dokumen Perjanjian Kinerja mengalami perubahan yakni pada jumlah anggaran programnya yang disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran kegiatan. Anggaran murni sebesar Rp 37.176.028.397,00 dan setelah perubahan sebesar Rp 50.499.037.477,00 bertambah sebesar Rp 13.323045.080.000.

Hasil evaluasi LKIP Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bontang memperoleh nilai 62,30 (B) dari bobot penilaian sebesar 100. Adapun rekomendasinya telah ditindak lanjut perbaikan. Berikut uraiannya:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	80 %
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Persen	65 %
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	Persen	100 %
			Persen	100 %

DAFTAR ISI

Kata Pegantar i

Ikhtisar Eksekusif ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Grafik vi

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 1

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi 1

1.1.2 Kedudukan 1

1.1.3 Tugas 2

1.1.4 Fungsi 2

B. Aspek Strategis Organisasi 2

1.2.1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2

1.2.2 Meningkatkan fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD …… 2

C. Permasalahan Utama Perangkat Daerah 2

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 3

1.4.1 Struktur Organisasi 2

1.4.2 Sumber Daya Manusia 4

1.4.3 Aset 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Tujuan dan Sasaran Strategis 8

2.1.1 Tujuan 8

2.1.2 Sasaran Strategis 8

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 11

C Perjanjian Kerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

A. Kerangka Pengukuran Kinerja 16

B. Capaian Indikator Kinerja Utama 19

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategi..... 20

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatife solusi yang telah dilakukan ……..... 21

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ……..... 23

BAB IV PENUTUP 26

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 4

Tabel 1.2 Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Jenis Kelamin 5

Tabel 1.3 Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Eselon 5

Tabel 1.4 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Status Kepegawaian 6

Tabel 1.5 Aset Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2020 6

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang …..... 9

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Sekeretariat DPRD Kota Bontang (Rencana Strategis Sebelum Reviu) 9

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Sekeretariat DPRD Kota Bontang (Rencana Strategis Sesudah Reviu) 10

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 (sebelum Reviu) 12

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 (sesudah Reviu) 13

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020 14

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020 14

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 15

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya…..... 17

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020 …..... 18

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020 …….…..... 19

Tabel 3.4 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir ……..... 19

Tabel 3.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ……..... 20

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD 20

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah 21

Tabel 3.8 Analisis Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran 21

Tabel 3.9 Hasil Analisis Survey Kepuasaan Masyarakat Sekretariat DPRD Tahun 2020 ……..... 23

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang 3

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang 4

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016-2021 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja tahun 2020, Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah perlu melaporkan hasil pelaksanaan kinerja sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2020, yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020.

Indikator kinerja Sasaran Strategis Sekreatriat DPRD Kota Bontang merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bontang. Sasaran Strategis ini menggunakan pendekatan hasil (outcome) dan atau keluaran (output) kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), benefit (manfaat) dan impact (dampak) sesuai DPA dan DPPA.

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Bontang No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kota Bontang dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kota Bontang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1.2 Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan adminstrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Unsur ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksankan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara adminstratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.1.3 Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan adminstrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.1.4 Fungsi

Dalam melaksankan tugas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan adminstrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan adminstrasi keuangan DPRD, Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai kondisi yang obyektif dikaitkan dengan kondisi ideal yang diharapkan , maka secara normative terdapat suatu kesenjangan, untuk itu agar kondisi ideal yang diharapkan bisa diwujudkan, maka diperlukan cara agar tercapainya sasaran melalui strategi dilingkungan Sekretariat DPRD yang dilakukan yaitu :

1.2.1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Dalam hal memberikan dukungan terhadap lembaga DPRD adalah menyangkut masalah dukungan administrasi perkantoran yang diperlukan termasuk di dalamnya membantu menyediakan barang dan jasa keperluan standar sebuah kantor serta membantu menyediakan sarana prasarana yang dianggap prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan.

1.2.2 Meningkatkan fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD

Agar kegiatan DPRD sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya bisa berjalan secara maksimal sangat diperlukan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota DPRD, sehingga dapat memehami, mengetahui dan menguasai semua bidang – bidang yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang

C. PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis perkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain Perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal belum optimal dan Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD belum optimal.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.4.1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD Kota Bontang dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan 6 (enam) kepala sub bagian, dengan uraian sebagai berikut:

1) Sekretaris DPRD
2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan
   a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
   a. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
   b. Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi
4) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
   a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
   b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang
(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Sekretariat DPRD Kota Bontang)

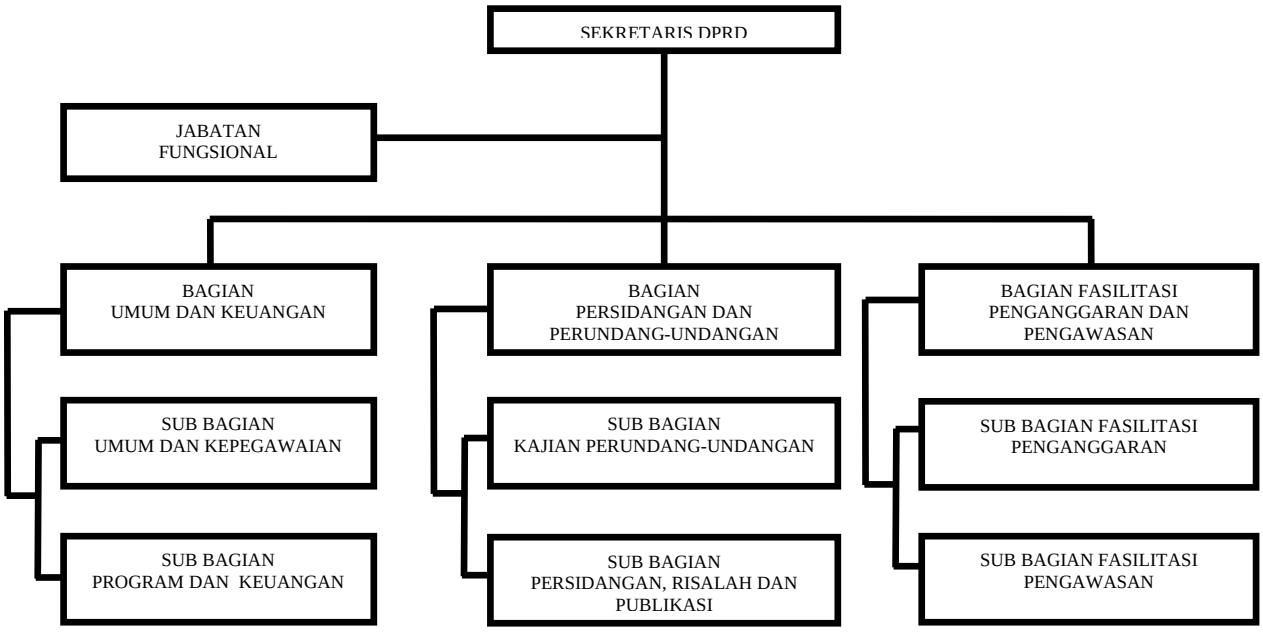

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan Tugas dan Fungsi, sampai dengan tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bontang di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 111 orang, PNS 32 orang, Tenaga Pendukung (Non PNS) 79 orang. Dengan latar pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	PNS	Non PNS	JUMLAH SELURUH PEGAWAI
1	SD / SEDERAJAT	0	3	3
2	SLTP / SEDERAJAT	1	-	1
3	SLTA / SEDERAJAT	18	48	66
4	D2/ D3	-	3	3
5	S1	9	25	34
6	S2	4	-	4
	JUMLAH	**32**	**79**	**111**

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan SLTA (sebanyak 66 orang), sisanya adalah S2 (4 orang), S1 (34 orang), D3 (3 orang), SLTP (1 orang) dan SD (3 orang). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang terdiri dari 68 pria dan 43 wanita, data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

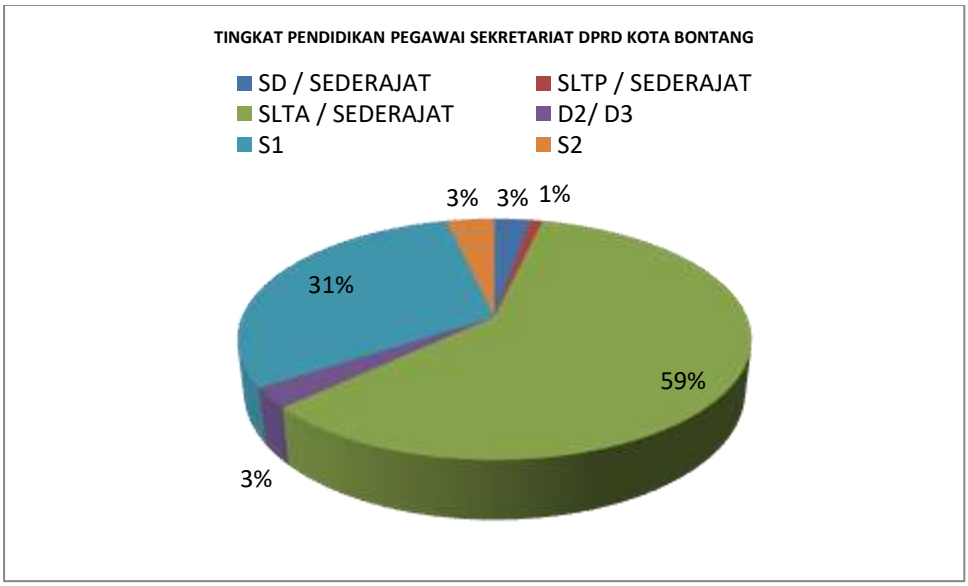

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Kota Bontang

Tabel 1.2. Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN						TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3/D2	S1	S2	
1	Laki – Laki	3	1	49	1	10	4	68
2	Perempuan	0	0	17	2	24	0	43
	Jumlah	**3**	**1**	**66**	**3**	**34**	**4**	**111**

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah: 1 (satu) orang Eselon IIB Sekretaris; 3 (tiga) orang Eselon IIIA Kepala Bagian; 6 (enam) orang Eselon IVA Kepala Sub Bagian, non eselon 22 orang dan Non PNS sebanyak 79 orang sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon IIB	Eselon IIIA	Eselon IVA	Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	1
2	Bagian Umum dan Keuangan	-	1	-	-	-	1
	- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	5	32	38
	- Sub Bagian Program dan Keuangan	-	-	1	8	3	12
3	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	-	1	-	-	-	1
	- Sub Bagian Kajian Peundang-undangan	-	-	1	3	6	10
	- Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi	-	-	1	4	32	37
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	1	-	-	-	1
	- Sub Bagian Fasilitasi Pengganggaran	-	-	1	1	2	4
	- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan	-	-	1	1	4	6
5	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**1**	**3**	**6**	**22**	**79**	**110**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bontang, 2020

Tabel 1.4. Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	GOLONGAN	PANGKAT	JUMLAH	%
1.	Gol (I/d)	Juru Tk. I	1	3 %
2.	Gol II (II/b)	Pengarur Muda Tk I	1	3 %
3.	Gol II (II/c)	Pengarur	7	22 %
4.	Gol II (II/d)	Pengatur Tk.I	7	22 %
5.	Gol III (III/a)	Penata Muda	6	19 %
6.	Gol III (III/c)	Penata	1	3 %
7.	Gol III (III/d)	Penata Muda Tk.1	5	16 %
8.	Gol III (IV/a)	Pembina	2	6 %
9.	Gol III (IV/b)	PembinaTk.1	1	3 %
10.	Gol III (IV/c)	Pembina Utama Muda	1	3 %
Jumlah			**32**	**100 %**

1.4.3 Aset

Ketersediaan sarana dan parasarana berikut kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran pencapaian indikator kinerja dan sasaran. Berikut kami sajikan sarana dan prasarana Kantor Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagai berikut :

Tabel 1.5. Aset Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2020

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
ASET TETAP		
Tanah	**-**	**-**
Peralatan dan Mesin	**6.900**	**49.869.749.792**
- Alat-alat Besar	8	4.187.425.900
- Alat-alat angkutan	52	10.464.437.413
- Alat-alat bengkel dan alat ukur	17	232.505.460
- Alat-alat kantor dan rumah tangga	6.108	29.113.931.880
- Alat-alat studi0, komunikasi dan pemencar	231	1.747.573.010
- Alat Laboratorium	16	171.436.999
- Alat-alat Persenjataan	4	6.359.000
- Komputer	459	3.922.430.130
- Peralatan Olahraga	5	23.650.000
Gedung dan bangunan	**26**	**117.991.102.223**
- Bangunan Gedung	23	116.924.465.118
- Bangunan Menara	1	174.513.349

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
- Tugu Titik Kontrol / Pasti	2	892.123.756
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**6**	**2.741.336.141**
- Jalan dan Jembatan	2	2.101.349.106
- Bangunan Air	2	601.655.035
- Instalasi	1	7.575.000
- Jaringan	1	30.757.000
Aset Tetap Lainnya	**757**	**1.338.676.500**
- Buku Perpustakaan	703	414.044.000
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12	82.325.000
- Tanaman	42	842.307.500
Konstruksi dalam pengerjaan	**5**	**291.215.764**
- Kontruksi dalam Pengerjaan	5	291.215.764
JUMLAH	**7694**	**172.232.080.420**
ASET LAINNYA	**10**	**2.698.018.500**
Software/Aset Lainnya		
- Software	8	1.300.546.000
- Hasil Kajian	2	1.398.372.500
Aset Lainnya	**318**	**488.451.752**
- Barang di hentikan dari penggunaan Aktif	-	-
- Barang dalam usulan penghapusan	318	488.451.752
JUMLAH		

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2020.

Secara keseluruhan aset tersebut telah memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang. Aset yang ada diupayakan maksimal daya gunanya melalui pengecekan dan pemeliharaan.

BABA II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, Sekretariat DPRD Kota Bontang mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tujuan Dan Sasaran Strategis

2.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Sekreatriat DPRD Kota Bontang tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bontang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP) ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang. Selain itu dapat mempertanggungjawabkan ke publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bontang.

2.1.2 Sasaran Strategis

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan).

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. *Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;*
2. *Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan*
3. *Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim*.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Penunjang yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD terkait dengan misi 1, yaitu: “menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia” Rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian Misi 1 dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang

Misi	Tujan	Sasaran
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Sekeretariat DPRD Kota Bontang (Rencana Strategis Sebelum Reviu)

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja pada tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan tugas pokok dan fungsi kepala daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi, melaksanakan tugas dan kewenangan serta kegiatan DPRD	Persentase jumlah raperda yang dibahas	10	10	12	17	17
				persentase jumlah rapat dengar pendapat dan koordinasi	250	250	250	250	250
				persentase jumlah rapat alat kelengkapan dewan	350	350	350	350	350
				persentase jumlah rapat paripurna	34	39	40	40	40
				persentase jumlah reses	3	3	3	2	3

				persentase jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	25	25	25	25	25
				persentase jumlah raperda inisiatif DPRD	10	15	14	20	21
				persentase jumlah perd yang dikaji	5	4	4	5	5
			Meningktanya akuntabilitas kinerja SKPD	persentase capaian hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Sekeretariat DPRD Kota Bontang (Rencana Strategis Sesudah Reviu)

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja pada tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan		Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja	Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan	0	0	75	80	85

	Kapasitas/ kinerja DPRD		sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD					
			Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	0	0	60	65	100
			Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD	0	0	100	100	100
				Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilasanakan oleh DPRD	0	0	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui RPJMD Kota Bontang dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2016 - 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 (sebelum Reviu)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi, melaksanakan tugas dan kewenangan serta kegiatan DPRD	Persentase jumlah raperda yang dibahas	Raperda	Realisasi Raperda yang dibahas x 100 Target Raperda yang dibahas	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah rapat dengar pendapat dan koordinasi	Rapat	Realisasi Jumlah Rapat x 100 Target Jumlah Rapat	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah rapat alat kelengkapan dewan	Rapat	Realisasi Jumlah Rapat x 100 Target Jumlah Rapat	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah rapat paripurna	Rapat	Realisasi Jumlah Rapat Paripurna x 100 Target Jumlah Rapat Paripurna	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah reses	Kali	Realisasi jumlah reses x 100 Target jumlah reses	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	Orang	Realisasi Anggota yang mengikuti x 100 Target Anggota yang mengikuti	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah raperda inisiatif DPRD	Raperda	Realisasi jumlah raperda inisiatif x 100 Target jumlah raperda inisiatif	Dokumen Pelaksana Kegiatan
		persentase jumlah perd yang dikaji	Dokumen	Realisasi jumlah perd yang dikaji x 100 Target jumlah perd yang dikaji	Dokumen Pelaksana Kegiatan
2	Meningktanya akuntabilitas kinerja SKPD	persentase capaian hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persen	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sekretariat DPRD)	Dokumen Pelaksana Kegiatan

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Hasil Reviu Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 (Sesudah Reviu)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatanya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	Jumlah DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD / Jumlah Seluruh Anggota DPRD x 100%	Dokumen Pelaksana Kegiatan
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Persen	Jumlah Propemperda yang difasilitasi pembahasannya / dijadwalkan untuk dibahas x 100 %	Dokumen Pelaksana Kegiatan
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase fasilitasi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	Persen	1. Jumlah fungsi pengawasan yang difasilitasi/ jumlah pengawasan diminta DPRD x 100% 2. Jumlah fungsi anggaran yang difasilitasi/ jumlah pembahasan anggaran direncanakan x 100 %	Dokumen Pelaksana Kegiatan

C. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja pada prinsipnya adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjanjian kinerja merupakan penugasan kepala daerah kepada kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Kepala Daerah) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80 %
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	65 %
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase fasilitasi yang dilaksanakan oleh DPRD	100 %
		Persentase fasilitasi anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 12.950.689.508,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 2.175.467.175,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 350.165.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 764.310.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 971.250,00	APBD
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 27.603.000,00	APBD
7	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 2.077.050.000,00	APBD
8	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Rp 13.725.162.500,00	APBD
Total		**Rp 32.071.418.433,00**	**APBD**

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80 %

2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	65 %
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase fasilitasi yang dilaksanakan oleh DPRD	100 %
		Persentase fasilitasi anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 17.269.646.432,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 3.145.949.775,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 1.055.680.406,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 801.030.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 100.300.000,00	APBD
6	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 4.232.841.900,00	APBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Rp 18.518.015.000,00	APBD
Total		**Rp 45.123.463.513,00**	**APBD**

Alokasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) Perubahan 2020 sebesar Rp. 50.499.073.477,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.375.609.964,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 45.123.463.513,00.

Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	22.372.606.613,00	49,58
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	21.445.981.900,00	47,53
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	1.304.875.000,00	2,89
Total		**45.123.463.513,00**	**100**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Bontang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dprd.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	

= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bontang

Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	AA (Sangat Memuaskan)	(> 90 - 100)	
2	A (Memuaskan)	(> 80 - 90)	
3	BB (Sangat Baik)	(> 70 - 80)	
4	B (Baik)	(> 60 - 70)	
5	CC (Cukup)	(> 50 - 60)	
6	C (Kurang)	(> 30 - 50)	
7	D (Sangat Kurang)	(> 0 - 30)	

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya di Inspektorat Kota Bontang dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			Tahun 2018	Tahun 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	15,29	22,21
2	Pengukuran Kinerja	25	15	16,56
3	Pelaporan Kinerja	15	6,13	9,54
4	Evaluasi Internal	10	4,50	3,84
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	2,50	10,16
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**43,42**	**62,30**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bontang termasuk dalam kategori B (>60-70) dengan nilai sebesar 62,30.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Dprd Kota Bontang tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Dprd Kota Bontang

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	75,59	94.00
2	Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	%	65	88,89	136.00
3	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD	%	100	94,44	94.00
4	Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilasanakan oleh DPRD	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah, dengan capaian kinerja 136 %.
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilasanakan oleh DPRD, dengan capaian kinerja 100 %.
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, dengan capaian kinerja 94 %, pada indikator Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD, dengan capaian kinerja 94 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Bontang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2021. Jumlah

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	75,59	94.00
2	Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	%	65	88,89	136.00
3	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD	%	100	94,44	94.00
4	Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilasanakan oleh DPRD	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Satu indikator mencapai target dan dua indikator tidak mencapai target sebesar 75,59 % dari target 80% dan 94,44 % dari target 100%

Tabel 3.4

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	0	0	76	75,59
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Persen	0	0	51,28	88,89
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	Persen	0	0	53	94,44
			Persen	0	0	100	100

Tabel 3.5

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2020	Target Renstra	Persentase Peningkatan atau (penurunan) 2020
1	2	3	4	5	6	6=(5/6)*100%
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	75,59	80	94.00
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Persen	88,89	65	136.00
3	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	Persen	94,44	100	94.00
			Persen	100	100	100.00

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatife solusi yang telah dilakukan

Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	0	0	0	0	0	0	75	76	101	80	75,59	94.00

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" adalah sebesar 75,59 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" tahun ini menurun 7.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.00

Sasaran 2
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	%	0	0	0	0	0	0	60	51	85.00	65	88,89	136.00

Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah " adalah sebesar 88,89 dari target sebesar 65 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).
- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah " tahun ini meningkat 51.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 85.00

Sasaran 3
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD	%	0	0	0	0	0	0	100	53	53.00	100	94,44	94.00
2	Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilasanakan oleh DPRD	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD " adalah sebesar 94,44 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).
- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilasanakan oleh DPRD " tahun ini meningkat 41.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 53.00
- Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilasanakan oleh DPRD " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas sasaran strategis dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan sebanyak 23 kegiatan dan melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Salah satu program ini ialah melakukan Skor kepuasan masayarakat dilingkungan sekretariat DPRD Kota Bontang yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 3.9

Hasil Analisis Survey Kepuasaan Masyarakat Sekretariat DPRD Tahun 2020

Pendapat Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0	2	0	0	0	0	0	1	1
Kurang Baik	1	3	4	7	3	4	1	1	1
Baik	62	56	62	45	63	58	65	44	65
Sangat Baik	4	6	1	15	1	5	1	21	0
Kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah Responden	67	67	67	67	67	67	67	67	67
∑Nilai/Unsur	204	200	198	209	199	202	201	219	198
NRR/Unsur	3.045	2.985	2.955	3..119	2.97	3.015	3	3.269	2.955
NRR tertbg/ Unsur	0.338	0.331	0.328	0.346	0.33	0.335	0.333	0.363	0.328
JUMLAH IKM TERTIMBANG									*)3,032
NILAI IKM KONVERSI : 3.032 x 25									75,79

Dari hasil survey kepuasan masyarakat layanan di Sekretariat DPRD mendapatkan skor 75,79.

IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Bontang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertangungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan good govermance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang dapat terlaksana lebih baik, diupayakan hal – hal sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegendalian termasuk didalamnya pelaporan.
2. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi dapat terwujud.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, sebagai upaya mengembangkan daya kreativitas dan kemampuan personil
4. Mengupayakan penegakan dan peningkatan disiplin pegawai sebagai sarana peningkatan kinerja dan produktivitas kerja dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada legislative.
5. Dilakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas target dari indikator kinerja sasaran – sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga diharapkan indikator kinerja akan mencapai tepat sasaran dimasa-masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang.

Bontang, 31 Desember 2020
Sekretaris DPRD Kota Bontang

H. Lukman. S.S.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711231000031012